

LeSEHan

Pemantauan Dampak Implementasi SVLK Terhadap
Kelompok Rentan Marjinal di Jawa



FAO - EU FLEGT PROGRAMME

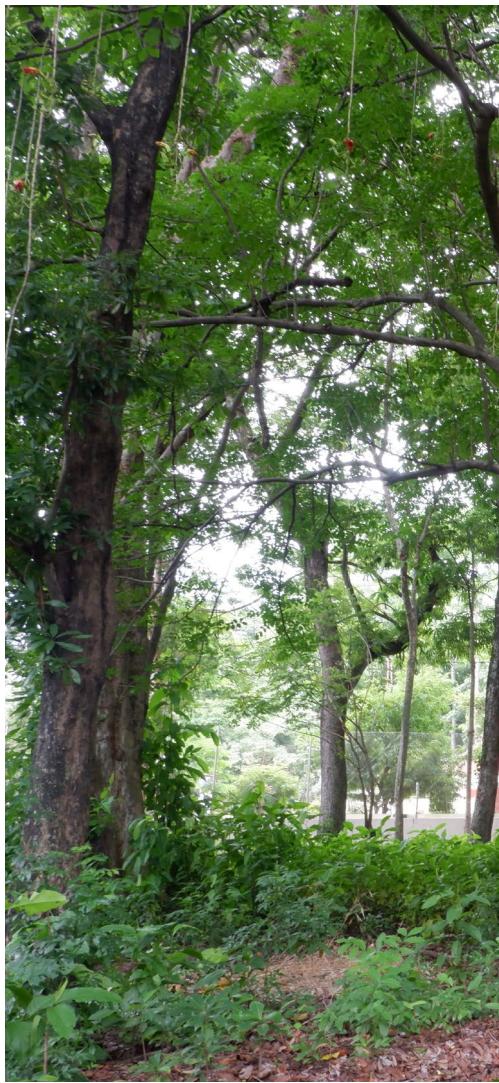


Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige





EDITORIAL
Andri Suseno

CREATIVE DIRECTOR
Dwi Nor Amadi

ART DIRECTOR
Jumanto

PHOTOGRAPHY
Dwi Nor Amadi
Andri Suseno
Risky Ayu Sejati

ART & LAYOUT
Dwi Nor Amadi
Andri Suseno

OFFICE
Jl. Rimba Mulya No.11, Kartoharjo,
Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117

lesehan.org@gmail.com
www.lesehan.org

02.

Opini

oleh Direktur
LeSEHan

03.

Sekapur Sirih

oleh Direktur
LeSEHan

04.

Kebijakan SVLK

di era Covid-19

05. **Aplikasi Sistem**

Monitoring Dampak (SDM) SVLK

06. **FGD Pasuruan**

Pengumpulan Data Primer

07. **FGD Trenggalek**

Pengumpulan Data Primer

08. **FGD Jombang**

Pengumpulan Data Primer

09.

Workshop dilak- sakan di Madiun

Workshop tentang hasil
survey data dasar Monitoring
Implementasi Sistem
Verifikasi dan Legalitas
Kayu (SVLK),





10.

Workshop dilak- sakan di DIY

Jogja, 12 Maret 2020,
bertempat di Hotel LPP Con-
vention Yogyakarta, telah
dilaksanakan Workshop
dengan tema Hasil,

SEKAPUR SIRIH

Pemantauan Dampak Penerapan SVLK terhadap Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Survei data dasar implementasi SVLK ini dilaksanakan di sembilan kabupaten di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Survey ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan desain Sistem Monitoring Dampak (SMD) implementasi SVLK yang disusun pada tahun 2016 oleh PT. Hatfiled. Pada tahun 2017, dilakukan review dan perubahan pada indikator dan verifier pada desain SMD 2016. Tahun 2018, KLHK membentuk Tim Penyusunan Baseline Data Monitoring Dampak Implementasi SVLK. Tim ini bertugas membuat data dasar pada lima wilayah dampak, yaitu wilayah dampak Efektifitas Kelembagaan dan Tata Kelola, Pemberantasan Ilegal Logging, Kondisi Hutan, Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Penghidupan. Salah satu rekomendasi disebutkan bahwa penyusunan data dasar yang wilayah dampak keberlanjutan sumber penghidupan harus dilengkapi dengan pengambilan data primer. Mengingat sulitnya mendapatkan data-data sekunder untuk mengetahui data dasar wilayah dampak tersebut.

Survey ini difokuskan pada dampak pembangunan ekonomi dan dampak keberlanjutan sumber penghidupan bagi kelompok marginal dan rentan. Pengumpulan data dasar mengikuti time-series implementasi SVLK, yaitu tahun 2013 saat penandatanganan dokumen FLEGT-VPA antara Indonesia – EU, tahun 2016 saat Indonesia menerima FLEGT Licence



dan tahun 2018 dua tahun setelah Indonesia menerima FLEGT Licence.

Potret data dasar implementasi SVLK ini dapat dipergunakan untuk mengukur dampak secara series dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan SVLK. Tujuannya agar SVLK dapat menjadi jaminan atas legalitas kayu dan perbaikan tata kelola kehutanan, namun juga tetap dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan sumber penghidupan kelompok marginal dan rentan. Dalam hal ini adalah unit hutan rakyat, IKM, perajin, dan tenaga kerja unit usaha industri kayu.

Survey dilakukan dengan melibatkan parapihak, yaitu

dinas provinsi dan kabupaten, kelompok masyarakat, dan unit usaha di lokasi survey, yang mendukung dalam pengumpulan data. Meskipun di dalam pengumpulan data dihadapi limitasi dengan tidak tersedianya dokumen rekam data beberapa indikator dampak dan tahun yang telah ditetapkan sebagai series data. Kami ucapan terima kasih atas partisipasi parapihak yang turut serta memberikan kontribusi data dan informasi dalam survey ini.

Hale Irfan Safrudi
Direktur Eksekutif
Lembaga Studi Ekosistem Hutan

Kebijakan SVLK di Era Covid-19



Sumber : <https://www.freepik.com/>

Tantangan dan Peluang svlk di masa new Normal. Achmad Zainudin, Ketua APKJ (Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara) November 2020.

Pandemi corono melanda Indonesia awal tahun 2020 yang mengakibatkan kelesuan ekonomi yang luar biasa khususnya dampak yang sangat besar untuk pengrajin kayu.

SVLK sebagai salah satu persyaratan untuk ekspor menjadi tidak menarik lagi bagi pelaku mebel lokal karena keterbatasan sumber daya ditambah lagi datangnya pandemic yang belum ada kepastian berakhir, dan juga tidak ada permintaan dari konsumen mengenai SVLK

Para pelaku UMK.M industri mebel sangat kesulitan dalam hal penjualan produk. Selain karena kebijakan pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, pelaku usaha sendiri juga dilanda ketakutan untuk beraktivitas keluar rumah dan daya beli masyarakat juga merosot tajam.

Bagi sebagian Pelaku industri kayu skala kecil lebih memilih bagaimana produksi bisa berjalan dan mengerjakan produk yang sudah berjalan,serta mulai memanfaatkan limbah yang di hasilkan dari proses produksi menjadi kerajinan.

Salah satu pelaku mebel Jepara, Ponco Suhirno Co Founder PT. President Furniture, mengatakan sekarang permintaan naik 50 %setelah new normal, setelah adanya kepanikan di awal tahun, buyer ingin mengamankan stok produk mereka dengan menambah jumlah pembelian furniture.

Dan menyatakan bahwa SVLK menjadi persyaratan utama karena produknya dikirimkan ke Inggris.

Perspektif Tafrikan, pemilik vista homedeco menggunakan media online sebagai strategi marketing baru untuk menjual produk yang dihasilkan secara langsung dengan pembeli dan memanfaatkan media

sosial seperti instagram, facebook dan marketplace tokopedia dan shopee, serta mampu melakukan virtual expo secara mandiri.

3M MELAWAN COVID-19

MEMAKAI MASKER

Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari *droplet* penyebab penularan Virus Corona.



<https://blog.ruangguru.com/>

MENCUCI TANGAN

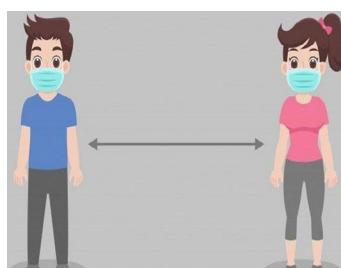
Mencuci tangan dengan Sabun dan air mengalir atau *handsanitizer* dapat membantu membunuh virus dan kuman yang berada di tangan.



<https://id.pngtree.com/>

MENJAGA JARAK

Mencegah kemungkinan menghirup *droplet* dari mulut atau hidung.



<https://health.grid.id/>

Seyogyanya Pemerintah selaku fasilitator bersama asosiasi mebel dan kerajinan bersama sama melakukan identifikasi pelaku usaha yang bergerak dalam ekspor mebel memberikan kebijakan yang pro ukm dengan menggratiskan dan bantuan pendampingan svlk, sehingga svlk tepat guna dan bermanfaat bagi kelangsungan usaha.

Hadirnya teknologi online akan mendorong dan memudahkan pelaku UMKM mengimplementasikan perizinan yang mudah dan murah yang bisa dilakukan dari rumah, juga mendorong penyelenggaraan pameran virtual skala internasional untuk mempromosikan

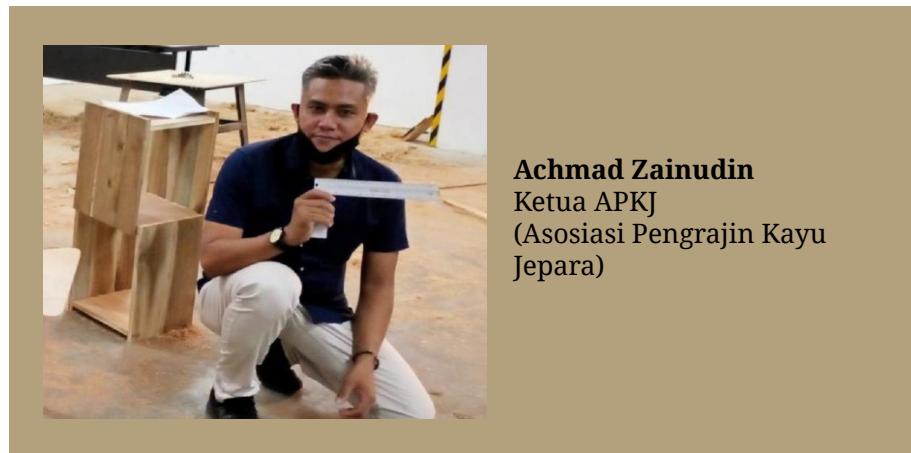
produk produk unggulan yang ber-svlk secara langsung dengan buyer khususnya dari Uni Eropa.

Sinergi antara pemerintah dan asosiasi perlu dibangun untuk mendorong tumbuhnya eksportir baru dan pasar pasar online skala internasional sehingga penerapan SVLK tepat sasaran dan bermanfaat bagi

kelangsungan industri mebel nasional.

Bagaimana implementasi SVLK terhadap pasar lokal? Dengan skema SVLK pro UMK(usaha mikro kecil),

yaitu GO, gratis dan online , maka SVLK nasional akan terwujud.



Achmad Zainudin
Ketua APKJ
(Asosiasi Pengrajin Kayu
Jepara)



Pengumpulan Data Primer FGD di 3 Klaster: LOG YARD, SAWMILL, dan FMU di Kabupaten Trenggalek

2019-11-05 Studi, Kajian, Diskusi dan Penelitian



Trenggalek, 5/11/19. Tim LeSEHan bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization of The United Nations dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan focus group discussion (FGD) dalam rangka Monitoring Implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Acara ini dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek.

FGD ini dihadiri oleh 25 orang, di antaranya terdiri dari 20 pelaku usaha yang terbagi menjadi tiga cluster yakni FMU, TPT, dan IUIPH-HK. Serta hadir pula para pegawai dari Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dari pelaku industri kehutanan yang bersangkutan dengan dampak penerapan SVLK yang selama ini sudah dijalankan.

Kepala Seksi PSDH Mintarno dalam sambutannya menjelaskan soal industri kayu yang berkembang di Kabupaten Trenggalek. Menurutnya, saat ini sudah ada 52 industri primer berizin dan 12 TPT. Selain itu, sudah ada 22 industri primer yang kini memiliki SVLK. Dan 5 FMU yang sudah memiliki izin yang sama.

Namun meski begitu, tak semua pelaku industri yang sudah memiliki SVLK melakukan pengawasan terhadap legalitas bahan baku. Hal ini dikarenakan SVLK belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha dari segi harga maupun produksi.

Sementara mereka yang melakukan pengawasan legalitas, dikarenakan tuntutan perusahaan mitra. Kebanyakan perusahaan mitra tersebut meminta pelaku industri untuk melampirkan SVLK, meskipun harga barang tidak

mengalami perubahan.

Di sisi lain, semua FMU tidak melakukan pengawasan legalitas karena para pembeli biasanya membeli kayu langsung ke petani.

Awal program SVLK berjalan, para pelaku usaha berharap dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. Namun setelah program SVLK dijalankan, hampir tak ada peningkatan yang dirasakan. Para pembeli dianggap tidak bisa membedakan produk kayu yang memiliki SVLK dengan yang tidak memiliki.



Namun meski begitu, ada perusahaan yang tetap melakukan pengawasan SVLK dengan alasan adanya tuntutan pasar, keinginan untuk menjaga lingkungan, serta mempersiapkan diri di masa depan ketika SVLK sangat dibutuhkan.

Tak hanya itu, para pelaku usaha memiliki harapan besar untuk Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dalam segi biaya yang dianggap masih tinggi dan teknis pengawasan legalitas bagi industri yang memiliki SVLK. Pelaku usaha juga berharap Pemerintah memiliki kebijakan untuk mewajibkan melampirkan SVLK pada setiap pengadaan furniture bagi pasar dalam negeri. Diharapkan ke depan para pelaku usaha bisa menjalankan SVLK dengan mandiri.



FGD PENGUMPULAN DATA WILAYAH KABUPATEN KLATEN



Lembaga Studi Ekositem Hutan (LeSEHan) mengadakan monitoring pengimplementasian Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu di Klaten pada 9 Desember 2019. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha kayu yang berdomisili di Klaten dan sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, para pelaku usaha kayu di Klaten memaparkan tentang pengalaman mereka terkait dengan dokumen SVLK. Kinaria Jati, pelaku usaha kayu di Klaten, dengan jelas menyatakan bahwa SVLK sama sekali tidak membawa dampak bagi penghasilan yang ia dapat. Ia bahkan tetap bisa mengirim produk kayu tanpa harus memiliki dokumen SVLK.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Agus Susato dari Puspa Jati. Baginya SVLK tidak memiliki dampak untuk penjualannya. Selain itu, proses yang harus dilalui untuk mendapatkan SVLK sangat rumit. Ia merasa tak ada waktu untuk mengurus dokumen SVLK karena sudah terlalu sibuk dengan proses produksi.

Mursid Raharjo dari UD Pahala merasa tanpa SVLK, justru usahanya berjalan semakin baik. Ia tidak perlu memusingkan soal administrasi pengadaan dokumen SVLK yang rumit. Awalnya, ia cukup terbantu dengan proses pengadaan dokumen SVLK yang gratis. Namun saat memasuki fase pengawasan, biayanya menjadi sangat mahal hingga mencapai Rp30 juta. Ia berharap pemerintah bisa menggratiskan proses pengadaan dokumen SVLK.

Poniman dari UD Karya Jati berharap kebijakan SVLK dihapus. Dulu ia berharap bisa mendapatkan proyek pengadaan di

tingkat kabupaten. Tapi pada kenyataannya, pengusaha yang mendapatkan proyek adalah mereka yang dekat dengan pemerintah. Dan belum tentu mereka memiliki dokumen SVLK.

Wahyu, perwakilan Dinas Perdagangan Klaten menjelaskan pada awal SVLK dikenalkan pada pengusaha kayu di Klaten cukup berat. Aturan dari pemerintah pun berubah setiap tahun. Dalam 2 tahun, banyak pelaku usaha kayu yang mendapatkan dokumen SVLK secara gratis. Namun ketika masuk proses pengawasan, mereka harus membayar biaya yang mahal. Itulah mengapa perlu kejelasan bagaimana SVLK dapat diterapkan secara nasional dan memiliki hukum yang jelas.

Mayoritas pelaku usaha kayu di Klaten sepakat bahwa SVLK belum membawa dampak besar bagi sumber penghasilan mereka. Menurut mereka, penerapan SVLK seharusnya pada penyedia bahan baku saja. Tak hanya itu, pelaku usaha kayu di Klaten berharap biaya SVLK dikurangi. Karena SVLK dirasa belum memberikan peningkatan finansial.

Meski banyak kendala yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Klaten sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan Peraturan Bupati untuk percepatan pembuatan dokumen SVLK. Namun peraturan dari Pemerintah Pusat yang masih sering berubah, membuat aturan tersebut masih sulit jika dilaksanakan di daerah.

Catatan Ringan

BELAJAR DARI NGAWI CATATAN PERJALANAN USAHA FURNITURE DARI DUA MAZHAB

Tulisan ini berawal dari aktifitas in-depth interview pada kelompok usaha kayu dan furniture sebagai bagian dari pengambilan data primer dalam program monitoring dampak implementasi SVLK yang didukung oleh FAO. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, kami menjumpai sosok-sosok hebat dalam dunia usaha. Mari kita temui dua orang pengusaha furniture di kabupaten Ngawi propinsi Jawa Timur yang sama-sama hebatnya. Adalah pak Bambang dan pak Sugeng, dua sosok pengusaha yang satu sama lain memiliki kelebihan masing-masing.

Jika kita melihat pada pak Bambang, pemilik UD Java Gedeg yang berlokasi di desa Sumberbening, maka akan tampak aura optimis yang tinggi, semangat '45, api yang berkobar-kobar seolah siap melahap apapun yang ada di depannya. Namun jika kita menoleh pada pak Sugeng, pemilik UD Sugeng Craft yang berlokasi di desa Kedunggalar, tampak sosok yang tenang, sederhana, santuy kalau bahasa anak sekarang, gak neko-neko (Jawa=tidak aneh-aneh). Dua karakter yang berbeda yang mempengaruhi sikap dan cara bisnis yang berbeda pula atau bisa dikatakan mempunyai mazhab yang berbeda.

Coba kita tengok bagaimana mereka menyikapi ketika pemerintah menerapkan SVLK terutama pada produk-produk yang dieksport. Ups... sebelum itu kita lihat kembali di mana letak hebatnya dari kedua pengusaha tersebut. Bahan baku yang digunakan oleh kedua pengusaha tersebut adalah sama-sama limbah. Kalau UD Java Gedeg banyak menggunakan kayu bongkaran rumah, yang kayunya agak lapuk. Bahkan apabila kayunya masih bagus, pak Bambang menumpuknya di ruang terbuka atau kalau perlu ditanam agar cepat lapuk. Sedangkan UD Sugeng Craft banyak menggunakan kayu yang biasanya kalau di rumah tangga untuk bahan bakar. Dari kayu jati bekas bongkaran rumah tersebut, UD Java Gedeg memaksimalkan lapuknya secara alami untuk dieksplorasi menjadi pelapis dinding atau produknya biasa dinamai "teak wall cladding". Sementara itu UD Sugeng Craft memproduksi lebih banyak varian, mulai dari furniture sampai aneka hiasan dan replica hewan.

Ketika SVLK diterapkan, pak Bambang lebih responsive dengan harapan berbekal sertifikat SVLK dia bisa melakukan ekspor sendiri. UD Java Gedeg cukup percaya diri ketika mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan produk yang unik karena erotion-nya dilakukan secara alami. Setelah mengikuti dua kali pameran

di IFFINA (International Furniture and Craft Fair Indonesia) dan JIFFINA (Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia), UD Java Gedeg mendapatkan pembeli dari Belanda. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, UD Java Gedeg telah melakukan ekspor kurang lebih 6 kontainer per tahun. Setiap kontainer berisi 2.000 m² dan setiap 1 m² bernilai US \$ 35. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun pendapatan UD Java Gedeg kurang lebih US\$ 1,260,000 atau sama dengan Rp. 17.640.000.000.

Agak berbeda dengan yang dilakukan oleh pak Sugeng, meski cukup responsive untuk mendapatkan sertifikat SVLK, namun bukan karena keinginan yang besar untuk bisa ekspor tapi untuk menjaga kepercayaan pembeli dalam negeri yang sudah rutin dalam kapasitas besar. Permintaan dari pembeli di dalam negeri itu, terutama yang berasal dari Jogjakarta dan Bali, kemungkinan besar sebagian dieksport juga. UD Sugeng Craft secara rutin sudah mengirim produknya sekitar 12 truk per bulannya ke Bali dan sekitar 4 truk per bulan ke Jogjakarta. Dalam 1 truk,

produk yang dikirim oleh UD Sugeng Craft bernilai kurang lebih Rp. 200.000.000,-. Di luar itu, perusahaan juga melayani permintaan kecil-kecil dari dalam negeri. Yang membedakan dengan pak Bambang adalah pak Sugeng adalah sosok yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan ekspor langsung lebih karena beliau ingin menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pembeli local kepada beliau. Di sinilah perbedaan mazhab itu terlihat.

Covid 19 pada pertengahan tahun 2019 yang mulai melanda dunia tak terkecuali Eropa dan negara-negara besar lainnya hadir menguji dua orang yang bermazhab berbeda tersebut. UD Java Gedeg mengalami stop produksi karena Belanda menjadi satu-satunya pembeli produknya. Dampak yang dirasakan sangat signifikan sehingga saat ini cukup banyak produk menumpuk yang seolah menunggu kondisi normal kembali. Situasi berbeda yang terjadi pada UD Sugeng Craft, hingga saat ini meskipun Covid 19 juga melanda Indonesia, penjualan produknya relative masih stabil. Kalau pun ada penurunan tidak sampai menghentikan produksinya.



Diskripsi Gambar



Diskripsi Gambar



Diskripsi Gambar



Program monitoring implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) di Jombang pada 18 Desember 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh staff Dinas Kehutanan dan pengusaha kayu di Jombang.

Direktur LeSEHan, Hale Irfan Safrudi, dalam kesempatan tersebut memaparkan tentang program yang sedang dijalankan LeSEHan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Food and Agriculture Organization of The United Nations. Menurut Rudi, kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menilai manfaat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) terhadap peningkatan ekonomi pengusaha kayu.

Agung, staff Dinas Kehutanan dan Koordinator Wilayah Nganjuk menjelaskan bahwa SVLK adalah kebijakan mandatory yang harus dijalankan oleh seluruh pengusaha kayu. Menurut dia, pengusaha kayu di Nganjuk sudah ada yang melengkapi dokumen SVLK dan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Begitu juga dengan para pelaku industri rumah tangga.

Namun, dampak SVLK belum terasa, karena hasil pengawasan menunjukkan banyak hal yang tidak dilakukan. Hanya pengusaha kayu yang melakukan eksport saja yang

bersedia memperpanjang lisensi.

Abdul Majito, pelaku industri rumah tangga menceritakan pengalamannya. Pada 2014-2015, ia mendapatkan pendampingan dari mitra usaha. Dan di tahun 2015, ia mendapatkan dokumen SVLK. Awalnya, ia berharap adanya dokumen SVLK bisa meningkatkan penjualan. Tetapi setelah tidak ada pendampingan, SVLK yang dimilikinya tidak pernah digunakan lagi. Pembeli tidak pernah menanyakan dokumen SVLK saat membeli produk kayu. Apalagi pemerintah daerah juga tidak memberikan fasilitas agar dokumen SVLK berguna. Jadi menurutnya, SVLK belum meningkatkan perekonomian industri rumah tangga.

Ahmad Yani, pelaku industri rumah tangga lain memiliki pengalaman berbeda terkait SVLK. Menurutnya, dokumen SVLK sangat penting. Ia pernah memenangkan sebuah tender untuk pengadaan perabotan di Dinas Pendidikan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namun ia mengaku tiba-tiba diperiksa oleh Tim Polisi Daerah Kalimantan. Untungnya, ia bisa menunjukkan dokumen yang sah.

Hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah SVLK dianggap sangat penting bagi sebagian besar pengusaha kayu. Namun para pengusaha kayu berharap beberapa permasalahan yang masih ada bisa segera diselesaikan oleh pemerintah.

FGD Pengumpulan Data Primer di Jombang, Jawa Timur

Pengumpulan Data Primer di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Di Yogyakarta (Kabupaten Ngawi)

pemerintah sering melakukan pembinaan melalui pelatihan dan bantuan alat pendukung. Wibi, pengusaha kayu dari UD Romansa mengatakan SVLK memberikan manfaat karena perusahaan kayu miliknya bisa melakukan ekspor sejak 2013. Namun di sisi lain, menurut Wibi, SVLK juga bisa menjadi beban bagi Usaha Kecil Menengah ketika harus bersaing dengan eksportir besar. Lalu terkait legalisasi akar tunggak kayu jati, ia berharap segera ada penyelesaiannya agar para pengusaha bisa dengan mudah mendapatkan bahan baku.

Menurut para pengusaha kayu di Ngawi, SVLK sangat penting bagi bisnis mereka. Sebab para buyer dari Eropa selalu menanyakan dokumen SVLK dulu sebelum membeli produk mereka. Jika terbukti tidak memiliki SVLK, maka pesanan bisa dibatalkan.

Kesimpulannya, ada permasalahan terkait bahan baku berupa akar tunggak jati oleh Perhutani bagi para pelaku usaha. Hal ini dikawatirkan dapat menghambat produksi kayu di Ngawi. Selain itu, masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak paham dengan sistem eksport yang benar.

Pada Kamis, 19 Desember 2019, Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) sudah melaksanakan pengumpulan data tentang implementasi program Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) di Ngawi. Acara ini dihadiri oleh Ibu Ita, Kepala Bidang Perindustrian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dan sejumlah pengusaha kayu yang berdomisili di Ngawi.

Ibu Ita, Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan kayu di Ngawi sudah mulai melakukan eksport produk kayu secara mandiri sejak tahun 2015. Dalam praktiknya, mereka tidak terkait dengan pihak manapun.

Namun, kebanyakan pengusaha kayu di Ngawi adalah pengrajin yang mengolah limbah kayu dan akar tunggak kayu jati. Padahal jenis usaha tersebut saat ini sudah dilarang oleh Perhutani. Ibu Ita pun berharap ada solusi dari permasalahan ini.

Sementara itu, menurut Ibu Ita, ada peningkatan jumlah perusahaan yang berhasil melakukan eksport produksi kayu sampai tahun 2019 di Ngawi. Kurang lebih ada 23 perusahaan yang melakukan eksport ke Belanda, Asia, Eropa, dan Amerika melalui Semarang, Surabaya, dan tak jarang di Bali, dan Yogyakarta.

Demi mendukung kegiatan eksport yang dilakukan para pengusaha kayu di Ngawi,



HASIL SURVEY DATA DASAR DAMPAK IMPLEMENTASI SVLK – MADIUN



Workshop tentang hasil survei data dasar Monitoring Implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk wilayah Jawa Timur telah dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhutani. Workshop ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian selama tiga bulan melakukan pengumpulan data di Jawa Timur yang dilakukan tim Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan). Selain itu, acara ini juga bertujuan mengumpulkan saran untuk hasil kajian tersebut.

Workshop yang diadakan di Madiun dihadiri oleh 22 orang yang terdiri dari Perwakilan Cabang Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perhutani, serta pelaku usaha industri kayu yang berasal dari Kabupaten Madiun, Ngawi, Trenggalek, Jombang, dan Pasuruan.

Direktur LeSEHan, Hale Irfan Safrudi mengatakan workshop ini merupakan rangkaian kegiatan LeSEHan bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization of The United Nations yang melakukan pengawasan implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) terhadap dampak pertumbuhan ekonomi

dan livelihood di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan tim LeSEHan pada bulan Oktober hingga Desember.

Ketua tim peneliti, Dr. Ir. Rahmanta Setiahadi, MP dan anggotanya Exwan Novianto, S.Hut, MP menyimpulkan hasil kajian di wilayah Jawa Timur. Hasil kajian tersebut sebagai berikut:

1. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu merupakan sistem yang melingkupi empat aspek antara lain legalitas usaha, PUHH, K3, dan legalitas perdagangan sudah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi.
2. Sumber kehidupan dan

kesejahteraan kelompok rentan dan marginal tidak terganggu dengan implementasi SVLK. Namun belum ada peningkatan kesejahteraan pada kelompok tersebut.

3. Desain Sistem Monitoring yang berisi indikator wilayah dampak pembangunan ekonomi dan wilayah dampak sumber penghidupan belum mampu memotret dampak langsung pengimplementasi SVLK.

Workshop ini tidak hanya dilakukan di Jawa Timur saja, melainkan nanti juga akan diadakan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Jogja, 12 Maret 2020, bertempat di Hotel LPP Convention Yogyakarta, telah dilaksanakan Workshop dengan tema Hasil SurveyBase line impact monitoring implementasi SVLK untuk areal DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah oleh Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) Madiun. Workshop ini dilakukan sebagai kegiatan lanjutan dalam projek Monitoring Dampak Implementasi SVLK, kerjasama LeSEHan Madiun dengan FAO. Workshop dihadiri oleh 25 orang yang berasal dari Dinas LHK DI Yogyakarta, Dinas Perdagangan Solo, serta para pelaku industri perkayuan dari kabupaten Klaten, Solo, Bantul dan kabupaten Gunung Kidul.

Diawali sambutan Direktur LeSEHan, Hale Irfan Safrudi,



menyampaikan bahwa Workshop Ini merupakan kegiatan LeSEHan yang bekerjasama dengan salah satu organisasi di Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yaitu Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam kerjasama tersebut LeSEHan dan FAO berupaya untuk memotret dampak implementasi SVLK terutama dalam wilayah dampak keberlanjutan penghidupan bagi kelompok marginal dan rentan atau Monitoring Impacts of SVLK Implementation on vulnerable and marginalised groups in Java. Adapun site yang menjadi objek kajian adalah Jawa Timur meliputi kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Jombang, Madiun, dan Ngawi. Untuk Jawa Tengah terdiri atas tiga kabupaten, yaitu Solo, Klaten, dan Jepara. Sedangkan untuk site Yogyakarta dipilih kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Kegiatan Workshop ini merupakan kelanjutan dari aktifitas Focuss Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha perkayuan.

Paparan hasil survey Baseline disampaikan oleh Lead Researcher DR. Ir. Rahmanta Setiahadji dan Exwan Novianto S.Hut, MP. Dalam paparanya disampaikan hasil survei untuk wilayah Jawa tengah dan dilanjut untuk wilayah D.I. Yogyakarta. Di awal presentasi, penyaji mencoba menggambarkan posisi SVLK dalam sebagai sebuah bungkus yang membungkus 4 aspek legal yang diantaranya adalah

- Legalitas usaha
- Penatausahaan kayu
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Legalitas perdagangan

Penggambaran tersebut memberi makna bahwa dengan melihat bungkus sertifikat LK itu sama maknanya dengan melihat 4 aspek legal. Pun sebaliknya jika bungkusnya dibuang bukan berarti membuang 4 aspek legal tersebut.

WORKSHOP DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penyaji kemudian menyampaikan latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan monitoring dampak implementasi SVLK. Kemudian dijelaskan metode survey baseline serta indikator dampak pembangunan ekonomi dan indicator wilayah dampak sumber penghidupan.

Dari hasil analisa data dasar untuk wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. SVLK sebagai sebuah system yang melingkupi 4 aspek – legalitas usaha, PUHH, K3, dan legalitas perdagangan berkontribusi memberikan dampak dalam pembangunan ekonomi. Meskipun, ini dapat dikatakan dampak atas aspek-aspek yang dilingkupi

2. Sumber penghidupan dan kesejahteraan pada kelompokrentan dan marginal tidak terganggu atas implementasi SVLK (social safeguard FLEG-VPA article 12). Meskipun demikian, implementasi SVLK belum menunjukkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pada kelompok tersebut.

3. Indikator wilayah dampak pembangunan ekonomi dan wilayah dampak sumber penghidupan yang telah disusun dalam Desain Sistem Monitoring (KLHK, 2016) belum mampu memotret dampak langsung atas implementasi SVLK.

Dari kesimpulan tersebut, tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk kegiatan monitoring dampak implementasi SVLK di wilayah Jawa Tengah serta DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. KLHK perlu melakukan review atas Desain Sistem Monitoring (2016) dengan menetapkan indicator-indicator dampak pembangunan ekonomi dan dampak sumber penghidupan yang lebih feasible, applicable, dan terukur untuk membangun data dasar atas dampak langsung implementasi SVLK.

2. Data dasar dampak implementasi SVLK (data series) perlu dibangun dengan melibatkan stakeholders pada tingkat nasional dan daerah, dilakukan secara berkala dan dengan indicator yang konstan. Hal ini berkaitan dengan akuisisi data dari berbagai instansi pemerintah (lintas KLHK) dan ukuran dampak.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab disampaikan juga dari Pak Eko dari IUI kabupaten Bantul bahwa SVLK sangat penting karena dapat memperbaiki tatanan administrasi perusahaan. Dengan tertibnya administrasi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan buyer terhadap produk legal dari Indonesia.

Pada sesi terakhir Direktur LeSEHan Hale Irfan Safrudi menyampaikan hasil dari workshop ini bukan final. Dari berbagai masukan peserta akan diolah lagi oleh tim peneliti. Pada akhir program akan dilakukan workshop final yang akan mengundang perwakilan peserta dari seluruh site di DI.Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa timur.